

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe penelitian hukum.....	11

1.5.2	Pendekatan ( <i>Approach</i> ).....	12
1.5.3	Bahan hukum ( <i>Legal Sources</i> ).....	13
1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum .....	15
1.5.5	Analisis bahan hukum .....	15
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	15
BAB II PENGATURAN PENGGUNAAN <i>DRONE</i> SIPIL OLEH NEGARA DI INDONESIA.....		18
2.1	Karakteristik <i>Drone</i> .....	18
2.1.1	Penggunaan Istilah .....	18
2.1.2	Subyek dalam Penggunaan <i>Drone</i> .....	20
2.1.3	Kategorisasi <i>Drone</i> .....	20
2.2	Pengaturan Penggunaan <i>Drone</i> di Indonesia.....	29
2.3	Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .....	31
2.3.1	Perlindungan Data Pribadi dalam Pemenuhan Hak atas Privasi .....	31
2.3.2	Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	35
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN <i>DRONE</i> SIPIL OLEH NEGARA .....		44
3.1	Pemrosesan Data Pribadi dalam Penggunaan <i>Drone</i> Sipil.....	44
3.1.1	Pengguna <i>Drone</i> sebagai Aktor Pemrosesan Data Pribadi .....	45
3.1.2	Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi .....	46

3.1.3	Hak Pemilik Data Pribadi .....	47
3.1.4	Jenis-Jenis Pemrosesan Data Pribadi .....	52
3.2	Negara Sebagai Pengguna <i>Drone</i> Sipil .....	56
3.2.1	Kepentingan Negara sebagai Pengecualian .....	57
3.2.2	Potensi Pelanggaran Data Pribadi pada Penggunaan <i>Drone</i> Sipil oleh Negara	60
3.3	Batasan Pemrosesan Data Pribadi oleh Negara.....	67
3.3.1	Batasan dalam Peraturan .....	68
3.3.2	<i>Privacy by Default</i> dan <i>Privacy by Design</i> .....	71
BAB IV PENUTUP .....		74
4.1	Kesimpulan.....	74
4.2	Saran.....	75
DAFTAR BACAAN.....		76

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4558).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3886).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaga Negara Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4956).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun  
2016 Nomor 1829).

Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat  
Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 579).

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Klasifikasi *Drone* Berdasarkan Ukuran, Berat dan Altitude.....24

Tabel 2. Klasifikasi *Drone* Berdasarkan Tingkat Otonomi.....25